**MATRIKS PERMINTAAN TANGGAPAN TERTULIS**

**RPOJK PERUBAHAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 70/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI**

| RPOJK  | PENJELASAN RPOJK  | TANGGAPAN | USULAN PERUBAHAN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |  |  |  |
|  |  |  |  |
| DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Menimbang: | UMUM |  |  |
| 1. bahwa untuk mendukung perkembangan industri pialang asuransi melalui penggunaan teknologi informasi dalam proses bisnis perusahaan pialang asuransi perlu untuk menyesuaikan ketentuan mengenai penyelenggaraan layanan pialang asuransi dengan menggunakan teknologi informasi agar layanan tersebut diselenggarakan dengan menerapkan praktik usaha yang sehat dan prinsip perlindungan konsumen;
 | Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.  |  |  |
| 1. bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha perusahaan tersebut diperlukan penyesuaian ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian;
 | Sejalan dengan tujuan OJK dan sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan Peraturan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. Penetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut antara lain dimaksudkan agar perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan penilai kerugian asuransi dapat memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan industri perasuransian dan perekonomian nasional, serta terlindunginya kepentingan konsumen perasuransian. |  |  |
| 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi;
 | Praktik penyelenggaran usaha perusahaan pialang asuransi terus berkembang seiring dengan perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan masyarakat. Hal ini antara lain tercermin dari percepatan penggunaan teknologi digital dalam layanan yang diselenggarakan oleh perusahaan pialang asuransi, serta meningkatnya kebutuhan kerja sama antara perusahaan pialang asuransi dan pihak lain untuk meningkatkan kualitas layanan perusahaan pialang asuransi. Pada satu sisi, praktik-praktik tersebut memberikan dampak positif bagi industri perasuransian dan konsumen, namun di sisi lain juga menimbulkan risiko sehingga perlu untuk diatur dan diawasi dengan tetap memberikan ruang untuk inovasi. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan diperlukan penyesuaian beberapa ketentuan, antara lain frekuensi penyampaian laporan berkala dan pengenaan sanksi kepada perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian. |  |  |
|  | Berkenaan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi. |  |  |
| Mengingat: |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 |  |  |  |
| 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5993);
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  |
| Menetapkan: |  |  |  |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 70/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI, PERUSAHAAN PIALANG REASURANSI, DAN PERUSAHAAN PENILAI KERUGIAN ASURANSI. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB IKETENTUAN UMUM |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5993) diubah sebagai berikut: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 diubah, serta ditambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka 22, angka 23, dan angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 | Angka 1 |  |  |
| Pasal 1 | Pasal 1Cukup jelas. |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: |  |  |  |
| 1. Usaha Pialang Asuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
 |  |  |  |
| 1. Usaha Pialang Reasuransi adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melakukan penempatan reasuransi atau reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
 |  |  |  |
| 1. Usaha Penilai Kerugian Asuransi adalah usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Penilai Kerugian Asuransi.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
 |  |  |  |
| 1. Pialang Asuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Asuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili pemegang polis, tertanggung, atau peserta dalam melakukan penutupan asuransi atau asuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
 |  |  |  |
| 1. Pialang Reasuransi adalah orang yang bekerja pada Perusahaan Pialang Reasuransi dan memenuhi persyaratan untuk memberi rekomendasi atau mewakili Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dalam melakukan penutupan reasuransi atau reasuransi syariah dan/atau penyelesaian klaim sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
 |  |  |  |
| 1. Tenaga Ahli adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian tertentu dan ditunjuk sebagai tenaga ahli pada Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, atau Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi tempatnya bekerja.
 |  |  |  |
| 1. Reasuradur adalah Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, perusahaan asuransi umum, atau perusahaan asuransi umum syariah yang menerima pertanggungan ulang termasuk retrosesi.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Ceding adalah:
 |  |  |  |
| 1. perusahaan asuransi umum yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi atau perusahaan asuransi umum lain;
 |  |  |  |
| 1. perusahaan asuransi umum syariah yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah, unit syariah pada Perusahaan Reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah lain atau unit syariah pada perusahaan asuransi umum;
 |  |  |  |
| 1. unit syariah pada perusahaan asuransi umum yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah, unit syariah pada Perusahaan Reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah atau unit syariah pada perusahaan asuransi umum lain;
 |  |  |  |
| 1. perusahaan asuransi jiwa yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi;
 |  |  |  |
| 1. perusahaan asuransi jiwa syariah yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi;
 |  |  |  |
| 1. unit syariah pada perusahaan asuransi jiwa yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi;
 |  |  |  |
| 1. unit syariah pada perusahaan asuransi jiwa yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi;
 |  |  |  |
| 1. perusahaan penjaminan yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi; atau
 |  |  |  |
| 1. perusahaan penjaminan syariah atau unit syariah pada perusahaan penjaminan yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi.
 |  |  |  |
| 1. Pemberi Tugas adalah pihak yang memberikan tugas penilaian kerugian dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi kepada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
 |  |  |  |
| 1. Objek Asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
 |  |  |  |
| 1. Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara Perusahaan Asuransi atau
 |  |  |  |
| 1. Rekening Premi adalah rekening Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi pada bank umum konvensional, bank umum syariah yang digunakan untuk menampung:
 |  |  |  |
| 1. premi atau kontribusi yang diterima dari pemegang polis, tertanggung, peserta, atau Perusahaan *Ceding*; atau
 |  |  |  |
| 1. klaim atau manfaat yang diterima dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah
 |  |  |  |
| 1. Rekening Operasional adalah rekening Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi pada bank umum konvensional, bank umum syariah yang khusus digunakan untuk kegiatan operasional
 |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |  |
| 1. Layanan Pialang Asuransi Digital adalah layanan Usaha Pialang Asuransi melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan jaringan internet.
 |  |  |  |
| 1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
 |  |  |  |
| 1. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:
 | Angka 2 |  |  |
| Pasal 2A | Pasal 2ACukup jelas. |  |  |
| Perusahaan Pialang Asuransi dapat menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam bentuk Layanan Pialang Asuansi Digital. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
 | Angka 3 |  |  |
| Pasal 14 | Pasal 14Cukup jelas. |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib memiliki Tenaga Ahli yang sesuai dengan bidang usaha dan kompetensinya.
 |  |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai Tenaga Ahli diatur dalam peraturan OJK mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dilarang mempekerjakan Tenaga Ahli yang telah dikenakan sanksi administratif berupa Pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
 | Angka 4 |  |  |
| Pasal 15 | Pasal15Cukup jelas. |  |  |
| 1. Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memenuhi tugas paling sedikit sebagai berikut:
 |  |  |  |
| 1. membuat dan menerapkan proses kerja Pialang Asuransi yang baik, termasuk proses penyelesaian klaim;
 |  |  |  |
| 1. menganalisis dan memperbaiki proses kerja Pialang Asuransi agar tetap sesuai dengan perkembangan industri asuransi;
 |  |  |  |
| 1. memberikan informasi terkini mengenai perkembangan industri asuransi dan peraturan di bidang perasuransian kepada Pialang Asuransi;
 |  |  |  |
| 1. memberikan arahan kepada Pialang Asuransi dalam memberikan masukan atau nasihat mengenai kebutuhan asuransi untuk calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta;
 |  |  |  |
| 1. memperhatikan dan memberikan arahan bagi Pialang Asuransi dalam bernegosiasi atau menyusun program asuransi;
 |  |  |  |
| 1. melakukan peninjauan atas kredibilitas Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dari berbagai aspek termasuk aspek finansial dan kemampuan/kapasitas dalam menerima risiko tertentu; dan
 |  |  |  |
| 1. memberikan arahan kepada Pialang Asuransi dalam hal negosiasi proses klaim.
 |  |  |  |
| 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Asuransi wajib berpedoman pada kode etik dan standar perilaku yang disusun oleh asosiasi profesi di Indonesia.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi yang mempekerjakan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memastikan Tenaga Ahli melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
 | Angka 5 |  |  |
| Pasal 16 | Pasal 16Cukup jelas. |  |  |
| * + - 1. Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib bertanggung jawab dalam:
 |  |  |  |
| 1. membina Pialang Asuransi agar bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 |  |  |  |
| 1. memastikan kebenaran dan kecukupan data untuk menyusun profil risiko tertanggung atau peserta;
 |  |  |  |
| 1. menjaga kerahasiaan data calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 |  |  |  |
| 1. menyampaikan data dan informasi yang akurat kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk melakukan seleksi risiko; dan
 |  |  |  |
| 1. mengetahui lebih banyak informasi mengenai Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan kredibilitasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi yang mempekerjakan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memastikan Tenaga Ahli melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 18 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:
 | Angka 6 |  |  |
| Pasal 18 | Pasal 18Cukup jelas. |  |  |
| 1. Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memenuhi tugas paling sedikit sebagai berikut:
 |  |  |  |
| 1. Dalam membuat dan menerapkan proses kerja Pialang Reasuransi yang baik, termasuk proses penyelesaian klaim;
 |  |  |  |
| 1. menganalisis dan memperbaiki proses kerja Pialang Reasuransi agar tetap sesuai dengan perkembangan industri asuransi;
 |  |  |  |
| 1. memberikan informasi terkini mengenai perkembangan industri asuransi dan peraturan di bidang perasuransian kepada Pialang Reasuransi;
 |  |  |  |
| 1. memberikan arahan kepada Pialang Reasuransi dalam memberikan masukan atau nasihat mengenai kebutuhan reasuransi untuk calon Perusahaan *Ceding*;
 |  |  |  |
| 1. memperhatikan dan memberikan arahan bagi Pialang Reasuransi dalam bernegosiasi atau menyusun program reasuransi;
 |  |  |  |
| 1. melakukan peninjauan atas kredibilitas Reasuradur dari berbagai aspek termasuk aspek finansial dan kemampuan/kapasitas dalam menerima risiko tertentu; dan
 |  |  |  |
| 1. memberikan arahan kepada Pialang Reasuransi dalam hal negosiasi proses klaim.
 |  |  |  |
| 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Reasuransi wajib berpedoman pada kode etik dan standar perilaku yang disusun oleh asosiasi profesi di Indonesia.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Reasuransi yang mempekerjakan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memastikan Tenaga Ahli melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:
 | Angka 7 |  |  |
| Pasal 19 | Pasal 19Cukup Jelas |  |  |
| 1. Tenaga Ahli pada Perusahaan Pialang Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib bertanggung jawab dalam:
 |  |  |  |
| 1. membina Pialang Reasuransi agar bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 |  |  |  |
| 1. memastikan kebenaran dan kecukupan data untuk menyusun profil risiko Perusahaan *Ceding*;
 |  |  |  |
| 1. menjaga kerahasiaan data calon Perusahaan *Ceding* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 |  |  |  |
| 1. menyampaikan data dan informasi yang akurat kepada Reasuradur untuk melakukan seleksi risiko; dan
 |  |  |  |
| 1. mengetahui lebih banyak informasi mengenai Reasuradur dan kredibilitasnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Reasuransi yang mempekerjakan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memastikan Tenaga Ahli melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3) sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:
 | Angka 8 |  |  |
| Pasal 21 | Pasal 21Cukup Jelas |  |  |
| 1. Tenaga Ahli pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memenuhi tugas paling sedikit sebagai berikut:
 |  |  |  |
| 1. mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi untuk menilai ganti rugi asuransi;
 |  |  |  |
| 1. mengevaluasi rancangan laporan penilaian ganti rugi asuransi; dan
 |  |  |  |
| 1. memverifikasi laporan penilaian ganti rugi asuransi
 |  |  |  |
| 1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib berpedoman pada kode etik dan standar perilaku yang disusun oleh asosiasi profesi di Indonesia.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang mempekerjakan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memastikan Tenaga Ahli melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:
 | Angka 9 |  |  |
| Pasal 22 | Pasal 22Cukup Jelas |  |  |
| 1. Tenaga Ahli pada Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib bertanggung jawab dalam:
 |  |  |  |
| 1. memastikan kejelasan, kelengkapan dan keakuratan laporan penilaian ganti rugi asuransi berdasarkan data dan informasi yang sudah diperoleh; dan
 |  |  |  |
| 1. memastikan laporan penilaian ganti rugi asuransi disusun
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang mempekerjakan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) wajib memastikan Tenaga Ahli melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 dihapus sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:
 | Angka 10 |  |  |
| Pasal 40 | Pasal 40Cukup Jelas |  |  |
| 1. Dihapus.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Reasuransi dapat menawarkan jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau reasuransi syariah dan/atau penanganan penyelesaian klaim secara digital atau elektronik.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Di antara Bab III dan Bab IV ditambahkan 1 (satu) bab baru yaitu Bab IIIA, serta di antara Pasal 51 dan Pasal 52 ditambahkan 8 (delapan) pasal, yaitu Pasal 51A, Pasal 51B, Pasal 51C, Pasal 51D, Pasal 51E, Pasal 51F, Pasal 5G, dan Pasal 5H yang berbunyi sebagai berikut:
 | Angka 11 |  |  |
| BAB III APENYELENGGARAAN LAYANAN PIALANG ASURANSI DIGITAL |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Bagian Kesatu** |  |  |  |
| **Ruang Lingkup Layanan Pialang Asuransi Digital** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 51A | Pasal 51A |  |  |
| 1. Layanan Pialang Asuransi Digital sebagaimana dimaksud pada Pasal 2A yang diberikan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta mencakup:
 | Ayat (1)Cukup Jelas |  |  |
| 1. jasa konsultasi dalam penutupan asuransi secara digital;
 |  |  |  |
| 1. jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi secara digital, termasuk penyampaian polis secara digital; dan/atau
 |  |  |  |
| 1. jasa penanganan penyelesaian klaim secara digital.
 |  |  |  |
| 1. Layanan Pialang Asuransi Digital sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat memberikan jasa konsultasi dan/atau keperantaraan, serta layanan klaim untuk produk asuransi yang memenuhi kriteria:
 | Ayat (2) |  |  |
| 1. telah memperoleh persetujuan atau pencatatan produk asuransi dari Otoritas Jasa Keuangan;
 | Huruf aCukup Jelas |  |  |
| 1. menggunakan polis individual;
 | Huruf bCukup Jelas |  |  |
| 1. memiliki proses seleksi risiko (*underwriting*) yang sederhana, antara lain tidak memerlukan survei terhadap objek risiko atau pemeriksaan kesehatan; dan
 | Huruf cContoh produk asuransi yang tidak memerlukan survei antara lain asuransi kendaraan bermotor baru yang tidak memerlukan pemeriksaan fisik kendaraan, sedangkan asuransi yang tidak memerlukan pemeriksaan kesehatan antara lain asuransi jiwa dengan kriteria *underwriting* *guaranteed acceptance*. |  |  |
| 1. termasuk dalam jenis produk asuransi:
 | Huruf dContoh asuransi harta bergerak (*movable property*) antara lain asuransi untuk furnitur, *smartphone,* *tablet*, *laptop*, komputer, dan televisi LED.Contoh asuransi aneka antara lain asuransi untuk hewan peliharaan (*pet insurance*). |  |  |
| 1. asuransi jiwa ekawarsa,
 |  |  |  |
| 1. asuransi kecelakaan diri,
 |  |  |  |
| 1. asuransi kesehatan;
 |  |  |  |
| 1. asuransi kendaraan bermotor,
 |  |  |  |
| 1. asuransi pengiriman barang untuk ekspedisi,
 |  |  |  |
| 1. asuransi perjalanan,
 |  |  |  |
| 1. asuransi kredit,
 |  |  |  |
| 1. asuransi aneka.
 |  |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi akan menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital untuk produk asuransi yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Perusahaan Pialang Asuransi wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum memberikan Layanan Pialang Asuransi Digital untuk produk asuransi tersebut.
 | Ayat (3)Cukup Jelas |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi akan menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital untuk produk asuransi yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Perusahaan Pialang Asuransi wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum memberikan Layanan Pialang Asuransi Digital untuk produk asuransi tersebut.
 | Ayat (4)Yang dimaksud dengan “spesifikasi produk asuransi” adalah penjelasan mengenai produk asuransi yang akan ditawarkan pada Layanan Pialang Asuransi Digital antara lain mengenai manfaat asuransi, risiko yang dijamin, besaran premi atau kontribusi, ketentuan *underwriting*, dan tata cara klaim.Yang dimaksud dengan “bukti kesiapan penggunaan Layanan Pialang Asuransi Digital” adalah dokumen yang dapat memberikan informasi mengenai kesiapan Perusahaan Pialang Asuransi untuk memberikan Layanan Pialang Asuransi Digital terhadap produk asuransi yang akan ditawarkan, antara lain (i) ketersediaan dokumen dan formulir yang digunakan dalam penawaran dan penutupan asuransi seperti ringkaan informasi produk dan layanan, formulir permohonan asuransi, dan formulir klaim, (ii) prosedur Layanan Pialang Asuransi Digital untuk produk asuransi yang akan ditawarkan, dan (iii) informasi mengenai sistem elektronik yang akan digunakan untuk penyediaan Layanan Pialang Asuransi Digital terhadap produk yang akan ditawarkan. |  |  |
| 1. Untuk dapat memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan Pialang Asuransi harus menyampaikan permohonan yang dilengkapi dengan:
 | Ayat (5)Contoh layanan yang sebagian dilakukan tidak secara digital adalah dalam penyediaan jasa keperantaraan perusahaan pialang asuransi menawarkan produk asuransi menggunakan sistus web *(website)* namun dalam proses seleksi risiko (*underwriting*) pada produk tersebut dilakukan survei/pertemuan secara tatap muka. |  |  |
| 1. spesifikasi produk asuransi;
 |  |  |  |
| 1. bukti persetujuan atau pencatatan produk asuransi;
 |  |  |  |
| 1. bukti kesiapan penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital untuk produk asuransi yang akan ditawarkan, antara lain sistem elektronik yang digunakan, prosedur Layanan Pialang Asuransi Digital, dan ringkasan produk dan formulir permohonan asuransi; dan
 |  |  |  |
| 1. analisis risiko dan mitigasi risiko atas Layanan Pialang Asuransi Digital terkait produk,
 |  |  |  |
| 1. Layanan pialang asuransi untuk:
 |  |  |  |
| 1. produk yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, atau ayat (3), dan/atau
 |  |  |  |
| 1. jasa konsultasi, keperantaraan, atau klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagian atau seluruhnya tidak secara digital,
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Bagian Kedua****Persetujuan Penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 51B | Pasal 51BCukup Jelas |  |  |
| 1. Layanan Pialang Asuransi Digital hanya dapat diselenggarakan oleh Perusahaan Pialang Asuransi yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital.
 |  |  |  |
| 1. Dalam memberikan Layanan Pialang Asuransi Digital, Perusahaan Pialang Asuransi bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, dan/atau peserta.
 |  |  |  |
| Pasal 51C | Pasal 51 CCukup Jelas |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital sebagaimana dimaksud pada Pasal 51B ayat (1) disampaikan:
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital; atau
 |  |  |  |
| 1. Pihak yang belum memiliki izin usaha Perusahaan Pialang Asuransi bersamaan dengan permohonan izin usaha Perusahaan Pialang Asuransi, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi dan persetujuan Layanan Pialang Asuransi Digital.
 |  |  |  |
| 1. Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank sesuai dengan format Permohonan Persetujuan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan disertai dokumen paling sedikit:
 |  |  |  |
| 1. Struktur organisasi yang memuat fungsi atau unit kerja yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital;
 |  |  |  |
| 1. Bukti perusahaan telah memiliki ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56A ayat (1) huruf a, berupa laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan perusahaan periode 2 (dua) triwulan terakhir sebelum permohonan persetujuan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 |  |  |  |
| 1. Bukti memiliki sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang Teknologi Informasi;
 |  |  |  |
| 1. Kebijakan, sistem, dan prosedur, termasuk alur proses masing-masing Layanan Pialang Asuransi Digital yang akan diselenggarakan;
 |  |  |  |
| 1. Bukti kepemilikan dan penguasaan sistem elektronik antara lain aplikasi, server, dan jaringan;
 |  |  |  |
| 1. Laporan hasil tes penetrasi sistem elektronik dari lembaga yang diakui oleh kementerian yang berwenang;
 |  |  |  |
| 1. Bukti kesiapan penerapan manajemen risiko, termasuk hasil analisis risiko dan pengendalian risiko;
 |  |  |  |
| 1. Daftar perjanjian kerja sama yang dilakukan dalam rangka Layanan Pialang Asuransi digital; dan
 |  |  |  |
| 1. Rencana bisnis dalam kurun waktu sampai dengan 3 tahun ke depan, yang paling sedikit meliputi:
 |  |  |  |
| 1. Strategi bisnis, termasuk target dan langkah realisasi target;
 |  |  |  |
| 1. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi; dan
 |  |  |  |
| 1. Pengembangan sumber daya manusia dan organisasi.
 |  |  |  |
| 1. Bukti perusahaan telah memiliki ekuitas, berupa laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan/atau laporan keuangan perusahaan periode 2 (dua) triwulan terakhir sebelum permohonan persetujuan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 51D | Pasal 51 D |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi yang telah memperoleh persetujuan penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital wajib mengajukan permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada instansi yang berwenang paling lambat 30 hari kalender sejak diterbitkannya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dengan menyertakan surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan peraturan perundang-undangan.
 | Ayat (1)Contoh dokumen lain yang dipersyaratkan berdasarkan perundang-undangan antara lain bukti persetujuan dari Badan Koordinasi Penananaman Modal, apabila dipersyaratkan berdasarkan perauran perundang-undangan. |  |  |
| 1. Permohonan pendaftaran sebagai penyelenggara sistem elektronik ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian kepada instansi yang berwenang.
 | Ayat (2) Cukup Jelas |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi dilarang menjalankan Layanan Pialang Asuransi Digital sebelum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada instansi yang berwenang.
 | Ayat (3) Cukup Jelas |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi wajib menyampaikan salinan tanda terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
 | Ayat (4) Cukup Jelas |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi wajib menjalankan Layanan Pialang Asuransi Digital paling lambat 30 hari kalender sejak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang.
 | Ayat (5) Cukup Jelas |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan membatalkan persetujuan Layanan Pialang Asuransi Digital yang telah diterbitkan bagi Perusahaan Pialang Asuransi yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (5).
 | Ayat (6) Cukup Jelas |  |  |
|  |  |  |  |
| **Bagian Ketiga****Sistem Elektronik yang Digunakan Dalam Layanan Pialang Asuransi Digital** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 51E |  |  |  |
| 1. Dalam penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital, Perusahaan Pialang Asuransi hanya dapat menggunakan sistem elektronik yang dimiliki, dikuasai, dan dikendalikan oleh Perusahaan Pialang Asuransi.
 | Ayat (1)Cukup Jelas |  |  |
| 1. Sistem Elektronik yang digunakan dalam Layanan Pialang Asuransi Digital wajib terdaftar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 | Ayat (2) Cukup Jelas |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan layanan Pialang Asuransi Digital wajib melakukan pemeliharaan dan/atau pengembangan sistem elektronik sesuai dengan rencana bisnis perusahaan.
 | Ayat (3) Cukup Jelas |  |  |
| 1. Sistem Elektronik yang digunakan dalam Layanan Pialang Asuransi Digital wajib paling sedikit memuat:
 | Ayat (4) Cukup Jelas |  |  |
| 1. nama Perusahaan Pialang Asuransi;
 |  |  |  |
| 1. persyaratan dan ketentuan penggunaan Layanan Pialang Asuransi Digital
 |  |  |  |
| 1. ringkasan informasi dan layanan dari produk asuransi yang dilakukan Layanan Pialang Asuransi Digital;
 |  |  |  |
| 1. Informasi mengenai perusahaan asuransi yang menyediakan produk asuransi yang ditawarkan dalam Layanan Pialang Asuransi Digital;
 |  |  |  |
| 1. informasi media layanan konsumen;
 |  |  |  |
| 1. informasi bahwa Perusahaan Pialang Asuransii diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital wajib menyediakan media komunikasi bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta untuk memastikan kelangsungan Layanan Pialang Asuransi Digital.
 | Ayat (5)Contoh media komunikasi yang digunakan antara lain surat elektronik, *call center*, atau media komunikasi lainnya |  |  |
|  |  |  |  |
| **Bagian Keempat****Sumber Daya Manusia di Bidang** **Teknologi Informasi** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 51F | Pasal 51F |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital wajib memiliki sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan pengalaman di bidang Teknologi Informasi sesuai dengan kompleksitas Teknologi Informasi yang digunakan.
 | Yang dimaksud dengan keahlian dan pengalaman di bidang teknologi informasi antara lain keahlian dan pengalaman pengembangan dan pengelolaan basis data (*database*), jaringan, keamanan sistem elektronik, dan pemrograman. |  |  |
| 1. Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 |  |  |  |
| 1. merupakan pejabat paling rendah 1 (satu) level di bawah direksi yang membawahkan fungsi Teknologi Informasi atau penanggung jawab pada unit atau fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital; dan
 |  |  |  |
| 1. memiliki kewenangan paling sedikit untuk mengembangkan, mengubah, dan menghapus sistem elektronik, dan
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital wajib menyelenggarakan program peningkatan kompetensi di bidang Teknologi Informasi bagi sumber daya manusia pada unit atau fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Bagian Kelima****Manajemen Risiko Penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 51G | Pasal 51 G |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital wajib memenuhi ketentuan manajemen risiko Teknologi Informasi sebagai Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang mayoritas kegiatan usahanya menggunakan Teknologi Informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Teknologi Informasi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
 | Cukup Jelas |  |  |
| 1. Dalam penerapan manajemen risiko atas penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital, Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital.
 |  |  |  |
| 1. Unit atau fungsi yang menangani penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas paling sedikit:
 |  |  |  |
| 1. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi pada Layanan Pialang Asuransi Digital terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan;
 |  |  |  |
| 1. mendukung pengembangan dan/atau pengadaan Teknologi Informasi pada Layanan Pialang Asuransi Digital;
 |  |  |  |
| 1. bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital;
 |  |  |  |
| 1. bertanggung jawab atas data transaksi keuangan Layanan Pialang Asuransi Digital; dan
 |  |  |  |
| 1. bertanggung jawab atas kendala dan permasalahan yang muncul dari penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 51H | Pasal 51 HCukup Jelas |  |  |
| Perusahaan Pialang Asuransi yang akan melakukan layanan Pialang Asuransi digital wajib terlebih dahulu:  |  |  |  |
| 1. Memperoleh persetujuan/pernyataan dari Perusahan Asuransi bahwa akan bertanggung jawab atas produk asuransi yang diperantarai oleh PPA secara digital, sepanjang:
 |  |  |  |
| 1. tertanggung telah memberikan data dan informasi pertanggungan sesuai yang diminta dalam sistem elektronik; dan
 |  |  |  |
| 1. membayar premi kepada perusahaan asuransi, perusahaan pialang asuransi, atau pihak yang melakukan kerja sama dengan perusahaan asuransi.
 |  |  |  |
| 1. Memastikan bahwa perusahaan asuransi dalam memperoleh persetujuan produk dari OJK telah melengkapi surat pernyataan perusahaan bahwa produk asuransi dapat dipasarkan secara digital dan tidak diperlukan survei lebih lanjut yang akan mempersulit proses pembayaran klaim.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (4) huruf a Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:
 | Angka 12 |  |  |
| Pasal 52 | Pasal 52 |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka perolehan bisnis atau melaksanakan sebagian fungsi dalam menyelenggarakan usahanya.
 | Ayat (1)Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan pihak lain” antara lain:a. kerja sama Perusahaan Pialang Asuransi dengan bank, perusahaan pembiayaan, pemasar *online* (termasuk e*-commerce, e-ticket sales, e-transportation* sebagai pembawa bisnis), dan/atau pemasar langsung; ataub. kerja sama Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi dengan penilai kerugian asuransi di luar negeri. |  |  |
| 1. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 | Ayat (2)Cukup Jelas |  |  |
| 1. tidak menghambat kegiatan operasional dan non-operasional Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi ; dan
 |  |  |  |
| 1. dituangkan dalam perjanjian tertulis.
 |  |  |  |
| 1. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 | Ayat (3)Cukup Jelas |  |  |
| 1. jangka waktu perjanjian;
 |  |  |  |
| 1. tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pelaksanaan tugas; dan
 |  |  |  |
| 1. kewajiban alih teknologi dan pengetahuan dalam hal perjanjian kerja sama dilakukan dengan pihak asing.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan bahwa pihak lain memenuhi ketentuan:
 | Ayat (4) |  |  |
| 1. memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang dalam hal dipersyaratkan untuk memperoleh izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 | Huruf aKriteria izin usaha hanya berlaku bagi pihak lain yang merupakan badan hukum. Sementara untuk pihak lain yang merupakan orang-perseorangan cukup memenuhi ketentuan huruf b dan c. |  |  |
| 1. tidak memiliki benturan kepentingan dengan pemegang polis, tertanggung, peserta, Perusahaan *Ceding,* dan/atau penanggung; dan
 | Huruf bYang dimaksud dengan “penanggung” adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah. |  |  |
| 1. memiliki kemampuan dan pengalaman yang mendukung pelaksanaan tugas.
 | Huruf cCukup Jelas |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Di antara Pasal 54 dan Pasal 55 ditambahkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 54A yang berbunyi sebagai berikut:
 | Angka 13 |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 54A | Pasal 54ACukup Jelas |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan sebagian fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 52, dalam bentuk:
 |  |  |  |
| 1. kerja sama dengan penyedia jasa pemrosesan penyelesaian transaksi, untuk pembayaran premi atau kontribusi kepada Perusahaan Pialang Asuransi dan/atau kepada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah;
 |  |  |  |
| 1. kerja sama dengan penyedia teknologi informasi; dan/atau
 |  |  |  |
| 1. kerja sama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas operasional dan layanan Perusahaan Pialang Asuransi.
 |  |  |  |
| 1. Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perusahaan Pialang Asuransi dilarang:
 |  |  |  |
| 1. melakukan alih daya penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital kepada pihak lain; dan/atau
 |  |  |  |
| 1. mengalihkan pengelolaan data calon pemegang polis, tertanggung, atau peserta dan infrastruktur Teknologi Informasi kepada pihak lain.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Di antara Bab IV dan Bab V ditambahkan bab baru yaitu Bab IVA, serta di antara Pasal 55 dan Pasal 56 ditambahkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 55A dan 55B, yang berbunyi sebagai berikut:
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| BAB IVAUSAHA PIALANG ASURANSI DAN USAHA PIALANG REASURANSI SECARA BERSAMA-SAMA (*CO-BROKING*) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 55A | Pasal 55ACukup Jelas |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi dapat melakukan Usaha Pialang Asuransi secara bersama-sama (*co-broking*) dengan Perusahaan Pialang Asuransi lainnya.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Reasuransi dapat melakukan Usaha Pialang Reasuransi secara bersama-sama (*co-broking*) dengan Perusahaan Pialang Reasuransi lainnya.
 |  |  |  |
| 1. Usaha Pialang Asuransi yang dilakukan secara bersama-sama (*co-broking*) oleh Perusahaan Pialang Asuransi dapat dilakukan terhadap penutupan asuransi atau asuransi syariah atas nama pemegang polis tertanggung atau peserta untuk satu objek asuransi bersama-sama dalam kasus per kasus.
 |  |  |  |
| 1. Usaha Pialang Reasuransi yang dilakukan secara bersama-sama (*co-broking*) oleh Perusahaan Pialang Reasuransi dapat dilakukan terhadap penutupan reasuransi atau reasuransi syariah atas nama Perusahaan Ceding untuk satu objek asuransi bersama-sama dalam kasus per kasus.
 |  |  |  |
| 1. Usaha Pialang Asuransi secara bersama-sama (*co-broking*) oleh lebih dari satu Perusahaan Pialang Asuransi tidak dapat dilakukan untuk penyelenggaraan Layanan Pialang Asuransi Digital.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 55B | Pasal 55BCukup Jelas |  |  |
| 1. Usaha Pialang Asuransi dan Usaha Pialang Reasuransi secara bersama-sama (*co-broking*) dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis dan/atau dokumen lainnya.
 |  |  |  |
| 1. Perjanjian tertulis dan/atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit sebagai berikut:
 |  |  |  |
| 1. susunan keanggotaan yang terdiri dari ketua (*lead broker*) dan anggota (*sub-broker*);
 |  |  |  |
| 1. Prosedur penerimaan dan penerusan Premi dan/atau kontribusi antara ketua (*leader*) dan anggota (*member*) sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam ketentuan ini.
 |  |  |  |
| 1. Prosedur pelayanan klaim.
 |  |  |  |
| 1. Hak dan kewajiban para pihak
 |  |  |  |
| 1. Jangka waktu perjanjian.
 |  |  |  |
| 1. Mekanisme penyelesaian perselisihan.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 | Angka 15 |  |  |
| Pasal 56 | Pasal 56 |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi setiap saat wajib memiliki ekuitas paling sedikit sebesar:
 | Ayat (1)Cukup Jelas |  |  |
| 1. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), bagi Perusahaan Pialang Asuransi yang tidak menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital; atau
 |  |  |  |
| 1. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) bagi Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi yang menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib menyesuaikan ekuitas untuk memenuhi besaran ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tahapan sebagai berikut:
 | Ayat (2)Yang dimaksud dengan “setiap saat” yaitu sejak Perusahaan Pialang Asuransi mengajukan permohonan persetujuan Otoritasa Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital dan selama Perusahaan Pialang Asuransi menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital. |  |  |
| 1. paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan.
 |  |  |  |
| 1. paling sedikit sebesar Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan.
 |  |  |  |
| 1. paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan.
 |  |  |  |
|  | Pasal 57Dihapus |  |  |
|  | Pasal 58Dihapus |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 59 | Pasal 59Cukup Jelas |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi wajib menyusun dan menyampaikan kepada OJK:
 |  |  |  |
| 1. laporan keuangan triwulanan;
 |  |  |  |
| 1. laporan keuangan tahunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; dan
 |  |  |  |
| 1. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib menyampaikan kepada OJK:
 |  |  |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian; dan
 |  |  |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik.
 |  |  |  |
| 1. Laporan keuangan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang merupakan laporan yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 31 Desember, wajib disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
 |  |  |  |
| 1. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b yang merupakan laporan yang berakhir pada tanggal 31 Desember, wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 60 diubah sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 60 | Pasal 60 |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dalam bentuk dokumen elektronik (*soft copy)*.
 | Ayat (1)Cukup Jelas |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a dalam bentuk dokumen elektronik (*soft copy)*.
 | Ayat (2)Cukup Jelas |  |  |
| 1. Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.
 | Ayat (3)Cukup Jelas |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi memperoleh izin usaha kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir, kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku pada tahun takwim berikutnya.
 | **Ayat (4)**Yang dimaksud dengan “kurang dari 6 (enam) bulan hingga tahun takwim berakhir” adalah sejak 1 Juli sampai dengan 31 Desember. |  |  |
| 1. OJK setiap saat dapat meminta laporan atau informasi selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 | Ayat (5)Cukup Jelas |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai bentuk, susunan, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran OJK.
 | Ayat (6)Cukup Jelas |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (2) Pasal 61 diubah sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:
 | Angka 18 |  |  |
| Pasal 61 | Pasal 61Cukup Jelas |  |  |
| 1. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b wajib disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.
 |  |  |  |
| 1. Penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai akuntan publik dan kantor akuntan publik.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 63 diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal 63 | Pasal 63Cukup Jelas |  |  |
| 1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 5 ayat (1), ayat (2), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 26, Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51A ayat (2) dan ayat (2), Pasal 51B ayat (1), Pasal 51D ayat (1) ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 51E, Pasal 51F ayat (1) dan ayat (3), Pasal 51G ayat (1) dan ayat (3), Pasal 51H, Pasal 52 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 54 ayat (3), Pasal 54A ayat (2), Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 55C, Pasal 56, Pasal 56A, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 61 ayat (1), dan Pasal 62 Peraturan OJK ini dikenai sanksi administratif berupa:
 |  |  |  |
| 1. Peringatan tertulis;
 |  |  |  |
| 1. Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan
 |  |  |  |
| 1. Pencabutan izin usaha
 |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
 |  |  |  |
| 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat mengenakan sanksi tambahan berupa larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi, pada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, atau Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dilarang melakukan kegiatan usaha kepialangan asuransi, kepialangan reasuransi, atau penilai kerugian asuransi, baik untuk sebagian atau seluruh kegiatan usahanya.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 | Anjgka 20 |  |  |
| Pasal 65 | Pasal 65Cukup Jelas |  |  |
| Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan OJK ini sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, OJK mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 | Angka 21 |  |  |
| Pasal 66 | Pasal 66Cukup Jelas |  |  |
| Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan OJK ini dapat dikenai sanksi administratif berupa: |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; dan
 |  |  |  |
| 1. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi dan Pialang Reasuransi.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 | Angka 22 |  |  |
| Pasal 67 | Pasal 67Cukup Jelas |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, atau Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang tidak menyampaikan laporan triwulanan dan/atau laporan tahunan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak batas waktu penyampaian laporan triwulanan dan/atau laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (4) dinyatakan terlambat menyampaikan laporan triwulanan dan/atau laporan tahunan, dan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp200.000 per hari per laporan.
 |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, atau Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi yang tidak menyampaikan laporan triwulanan dan/atau laporan tahunan setelah melewati 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas waktu penyampaian laporan triwulanan dan/atau laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (4), dinyatakan melanggar kewajiban penyampaian laporan triwulanan dan/atau laporan tahunan dan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan pertama dan sanksi denda sebesar Rp20.000.000 per laporan.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 69 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2), sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:
 | Angka 23 |  |  |
| Pasal 69 | Pasal 69Cukup Jelas |  |  |
| 1. Perusahaan Pialang Asuransi yang telah menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan Layanan Pialang Asuransi Digital sebagaimana dimaksud pada Pasal 51A paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
 |  |  |  |
| 1. Dalam hal Perusahaan Pialang Asuransi tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pialang Asuransi wajib menghentikan kegiatan Layanan Pialang Asuransi Digital.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 70 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
 |  |  |  |
| Pasal 70 | Ayat 70Cukup Jelas |  |  |
| Dihapus. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1. Ketentuan Pasal 71 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:
 |  |  |  |
| Pasal 71 | Ayat 71Cukup Jelas |  |  |
| Dihapus. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Pasal II |  |  |  |
| Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta |  |  |  |
| pada tanggal  |  |  |  |
| KETUA DEWAN KOMISIONER |  |  |  |
| OTORITAS JASA KEUANGAN |  |  |  |
| REPUBLIK INDONESIA, |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| WIMBOH SANTOSO |  |  |  |